622 Website Perdagangan Berjangka Diblokir

Tanggal	: Senin , 02 Agustus 2021
Media	: Analisa Medan
Halaman	: 12
Wartawan	: Ant
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Muhammad Faisal *(Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur)*
Rubrik	: Ekonomi & Keuangan
Topik	: Blokir Situs Ilegal

622 Website Perdagangan Berjangka Diblokir

Samarinda, (Analisa)

KepalaDiskominfoProvinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal menyampaikan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)KementerianPerdagangan bekerja sama denganKementerianKomunikasidanInformatikaberhasilmemblokir 622 situs web tanpa izin.

Sikap tegas ini akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi danmendapatkanpelayanan secara legal dari transaksi perdagangan berjangka komoditi.

"Pada Juni 2021 sudah diblokir sebanyak 109 situs web di bidang perdagangan berjangkakomoditi(PBK)karenatidakmemiliki perizinan dari Bappebti, hal ini tentu saja untukmelindungi danmemberikanrasaaman serta melindungi warga negara Indonesia," kataMuhammadFaisalmengutip siaranpers yang dikeluarkan oleh Bappebti, di Samarinda, Sabtu (31/7).

Ia mengungkapkan biasanya penawaran di bidangPBKinimelalui situsweb, sehingga diharapkan masyarakat di Provinsi Kaltim agar tidakmudahpercayadenganpenawaran investasiyangmenjanjikankeuntungantinggi tanpa memiliki risiko secara online.

Perdagangan berjangka memang dapat memberikankeuntunganyang tinggi, namun juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau high risk high return.

Masyarakat diminta tidak mudah tergiur iming-imingpendapatan tetap(fixed income) maupunpembagiankeuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK.

"Intinya jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi dan cepat apalagi jikapenawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggotabarusebagai downline, dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung penipuan," lanjut Faisal.

Sebaiknya sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK ataupun menyetorkan sejumlahdanake rekening tertentu,masyarakat diharapkanselalumelakukanpengecekan legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan.

Masyarakatjugaharuskritisterhadapperusahaan investasi yang menjanjikan keuntungan besar secara persentase serta dalam jangka waktu tertentu.

"Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidakmudah tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebihdahulumekanisme transaksi, untung, dan ruginya,' kata Faisal.

Informasi lengkapmengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK, dapat dilihat melalui situs web https://www.bappebti .go.id. **(Ant)**